

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2022 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oki Oktavian¹, Mardhiyah Hayati², Yulistia Devi³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung¹²³

Okioktavian819@gmail.com¹, mardhiyahhayati.kampus@gmail.com²,
yulistiadevi@radenintan.ac.id³

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius untuk dibicarakan. Kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2018-2022 berada pada peringkat ketiga dipulau Sumatera. Kurangnya sumberdaya manusia dan tingginya jumlah penduduk juga dapat menyebabkan kemiskinan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk secara parsial terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Apakah ada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk secara simultan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Kemudian bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap Kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang di ambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dengan tahun pengamatan 2018-2022. Sampel dalam penelitian ini adalah 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung kemudian dikali dengan 5 tahun pengamatan. menjadi 75 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data panel dengan dibantu oleh aplikasi komputer yaitu *evIEWS 10*. Secara keseluruhan hasil regresi data panel dan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022. Variabel Jumlah Penduduk secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022. Kemudian secara simultan variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022. Selanjutnya dalam pandangan Islam Kemiskinan bukanlah suatu kenikmatan, melainkan ujian hidup. Islam mengajak umatnya untuk melaksanakan zakat juga berinfak dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dan mengurangi angka kemiskinan. Dimana perintah tersebut juga sudah dijelaskan dalam kitab Al-Qur'an.

Keywords : Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk.

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi untuk dibicarakan. Setiap negara pasti pernah mengalami masalah kemiskinan. Apalagi untuk negara berkembang, tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi. Salah satu negara berkembang yang masih terdapat permasalahan kemiskinan adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang masuk kedalam golongan negara berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi pusat perhatian (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017). Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sering muncul di negara berkembang maupun negara

maju. Kemiskinan merupakan Suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (*Badan Pusat Statistik*, n.d.).

Menurut Badan Pusat Statistik Kemiskinan merupakan kondisi ketika penduduk miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak meliputi kebutuhan pangan dan non pangan dengan di ukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dapat di kategorikan sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (*Badan Pusat Statistik*, n.d.). Kondisi seseorang ataupun masyarakat yang menghadapi situasi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi dalam memenuhi standar hidup minimal juga dapat di katakan miskin (Akhhmad, 2021). Kemiskinan sangat menghambat kehidupan sehari-hari seseorang. Kemiskinan juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial di karenakan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta serba kekurangan dalam segi perekonomian juga dapat di katakan miskin.

Kemiskinan juga berdampak terhadap kualitas hidup seseorang. Kemiskinan dapat disebabkan karena keterbatasan sumberdaya alam, kualitas sumberdaya manusia yang rendah serta kurangnya akses dan modal (Itang, 2013). Dengan adanya kemiskinan seseorang tidak mampu mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Di dalam Islam masalah kemiskinan juga di bahas dalam kitab Al-Qur'an. Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah suatu kenikmatan akan tetapi merupakan suatu bentuk ujian hidup (Setiawan & Hasanah, 2016). Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 268 (Kemenag, 2023) yang berbunyi :

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah Swt menjanjikan ampunan dan karunia-nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui {Q.S. Al-Baqarah : 268}

Dari ayat diatas dapat di jelaskan bahwasannya setan menakut nakuti kalian dengan kemiskinan, memalingkan dari amal saleh sehingga kalian tidak berinfak di jalan kebaikan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan, ampunan Allah amatlah luas, Dia maha kuasa untuk membuat kalian kaya, tidak ada satu masalahpun yang tidak diketahuinya (Quraish Shihab, 2023). Allah Swt sesungguhnya telah menciptakan manusia, sekaligus meyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhannya (Setiawan & Hasanah, 2016). Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 19 (RI, 2023a) yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta {Q.S Az-Zariat : 19}.

Permasalahan yang di hadapi oleh Provinsi Lampung adalah masih tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung apabila di dibandingkan dengan Provinsi yang ada di Pulau Sumatera masih tergolong cukup tinggi di bawah ini merupakan data jumlah penduduk miskin menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018-2022.

Tabel I
 Data Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018-2022

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018-2022				
		2018	2019	2020	2021	2022

1	Aceh	839.490	819.440	814.910	834.240	806.820
2	Sumatera Utara	1.324.980	1.282.040	1.283.290	1.343.860	1.268.190
3	Sumatera Barat	357.130	348.220	344.230	370.670	335.210
4	Riau	500.440	490.720	483.390	500.810	485.030
5	Jambi	281.690	274.320	277.800	293.860	279.370
6	Sumatera Selatan	1.068.270	1.073.740	1.081.580	1.113.760	1.044.690
7	Bengkulu	301.810	302.300	302.580	306.000	297.230
8	Lampung	1.097.050	1.063.660	1.049.320	1.083.930	1.002.410
9	Kep. Bangka Belitung	76.260	68.380	68.390	72.710	66.780
10	Kep. Riau	131.680	128.460	131.970	144.460	151.680

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2023*

Dari data di atas dapat dilihat bahwasannya jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung pada tahun 2018 menempati peringkat kedua dengan nilai 1.097.050 jiwa, kemudian pada tahun 2019 menempati peringkat ketiga dengan nilai 1.063.600 jiwa, pada tahun 2020 menempati peringkat ketiga dengan nilai 1.049.320 jiwa, pada tahun 2021 menempati peringkat ketiga dengan nilai 1.083.930 jiwa, dan pada tahun 2022 menempati peringkat ketiga dengan nilai 1.002.410 jiwa. Masalah kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung masih tergolong cukup besar. Di bawah ini merupakan data kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.

Tabel 2
 Data Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Lampung Barat	40.620	39.050	38.120	39.360	36.200
2	Tanggamus	73.770	71.900	70.370	71.890	67.430
3	Lampung Selatan	148.530	144.440	143.330	145.850	136.210
4	Lampung Timur	162.940	158.900	153.570	159.790	149.120
5	Lampung Tengah	160.120	153.840	152.280	155.770	143.340
6	Lampung Utara	128.020	122.650	119.350	121.910	114.670
7	Way Kanan	60.160	58.720	58.410	59.890	54.280
8	Tulang Bawang	43.100	42.060	42.430	44.530	39.190
9	Pesawaran	70.140	67.360	66.040	68.310	63.170
10	Pringsewu	41.630	40.550	40.120	41.040	38.180
11	Mesuji	15.010	14.940	14.720	15.240	13.880
12	Tulang Bawang Barat	21.930	21.140	20.290	23.030	20.720
13	Pesisir Barat	22.980	22.380	22.240	23.230	21.850
14	Bandar Lampung	93.040	91.240	93.740	98.760	90.510
15	Metro	15.060	14.490	14.310	15.320	13.680

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2023*

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwasannya permasalahan kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung masih tergolong cukup besar. Jumlah penduduk miskin terbesar berada pada Kabupaten Lampung Timur dengan nilai 160.940 jiwa pada tahun 2018. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin terendah berada pada Kota Metro dengan nilai 13.680 jiwa pada tahun 2022. Salah satu faktor

yang dapat menyebabkan naik dan turunnya angka kemiskinan adalah sumberdaya manusia (Ristika et al., 2021). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia yang mencakup kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) dan kondisi non fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat terlihat pada angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dapat dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat (Cassandra, 2016). Dibawah ini merupakan data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.

Tabel 3
Data Presentase Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 2018-2022

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Provinsi Lampung tahun 2018-2022				
	Angka harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (Ribu, Rupiah/Orang/tahun)	Indeks Pembangunan Manusia (presen)
2018	70,18	12,61	7,82	9.858	69,02
2019	70,51	12,63	7,92	10.114	69,57
2020	70,65	12,65	8,05	9.982	69,69
2021	70,73	12,73	8,08	10.038	69,90
2022	70,99	12,74	8,18	10.336	70,45

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2023*

Dari data diatas dapat dilihat bahwasannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Provinsi Lampung berada pada tahun 2022 sebesar 70,45 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia terendah berada pada tahun 2018 dengan nilai 69,02 persen. Di bawah ini merupakan data presentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.

Tabel 4
Data Presentase Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022

No	Wilayah	Presentase Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022				
		2018	2019	2020	2021	2022
I	Lampung Barat	66,74	67,50	67,80	67,90	68,39

2	Tanggamus	65,67	66,37	66,42	66,65	67,22
3	Lampung Selatan	67,68	68,22	68,36	68,49	69,00
4	Lampung Timur	69,04	69,34	69,37	69,66	70,58
5	Lampung Tengah	69,73	70,04	70,16	70,23	70,80
6	Lampung Utara	67,17	67,63	67,67	67,89	68,33
7	Way Kanan	66,63	67,19	67,44	67,57	68,04
8	Tulang Bawang	67,70	68,23	68,52	68,73	69,53
9	Pesawaran	64,97	65,75	65,79	66,14	66,70
10	Pringsewu	69,42	69,97	70,30	70,45	70,98
11	Mesuji	62,88	63,52	63,63	64,04	64,94
12	Tulang Bawang Barat	65,30	65,93	65,97	66,22	67,13
13	Pesisir Barat	62,96	63,79	63,91	64,30	65,14
14	Bandar Lampung	76,63	77,33	77,44	77,58	78,01
15	Metro	76,22	76,77	77,19	77,49	77,89

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2023*

Dapat dilihat dari data diatas bahwa Indeks Pembangunan Manusia Tertinggi tahun 2018-2022 adalah kota Bandar Lampung. Pada tahun 2018 sebesar 76,63 persen, kemudian pada tahun 2019 berjumlah 77,33 persen, pada tahun 2020 berjumlah 77,44 persen, pada tahun 2021 berjumlah 77,58 persen dan pada tahun 2022 berjumlah 78,01 persen. Kemudian untuk Indeks Pembangunan Manusia terendah dari tahun 2018-2022 terdapat di Kabupaten Mesuji.

Selain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah merupakan suatu permasalahan yang mendasar. Pertumbuhan penduduk yang tidak dapat di kendalikan dapat berakibat terhadap tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu pada kesejahteraan rakyat serta dapat menekan angka kemiskinan (Didu & Fauzi, 2016). Di bawah ini merupakan data Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.

Tabel : 5
Data Jumlah Penduduk Menurut Provinsi Lampung tahun 2018-2022

No	Wilayah	Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung tahun 2018-2022 (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	0-4	766.872	755.887	744.815	769.955	766.901
2	5-9	798.028	799.291	795.921	780.746	780.895
3	10-14	743.446	754.647	765.980	739.843	749.183
4	15-19	703.411	703.457	706.569	726.048	723.002
5	20-24	676.943	676.551	676.056	742.243	734.062
6	25-29	657.125	655.057	652.567	742.042	741.209
7	30-34	651.198	649.987	648.289	737.769	737.703
8	35-39	644.399	644.123	642.922	707.456	714.198
9	40-44	619.329	625.910	631.567	671.492	678.849
10	45-49	544.988	558.742	571.442	606.098	619.842
11	50-54	463.678	476.150	488.769	520.631	535.180
12	55-59	378.568	392.455	406.298	432.125	446.282

13	60-64	280.170	295.096	309.115	335.198	349.363
14	65-69	186.047	197.100	209.236	246.816	258.071
15	70-74	121.261	125.276	130.596	157.338	168.046
16	75+	135.022	138.008	141.059	165.992	173.760
17	Jumlah	8.370.485	8.447.737	8.521.201	9.081.792	9.176.546

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2023*

Dari data diatas dapat dilihat bahwasannya jumlah penduduk di Provinsi Lampung mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Jumlah penduduk tertinggi berada pada tahun 2019 dengan usia 5-9 tahun sebesar 799.291 jiwa. Kemudian untuk jumlah penduduk terendah berada pada tahun 2018 dengan usia 70-74 tahun sebesar 121.261 jiwa. Dibawah ini merupakan data jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.

Tabel : 6
Data Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022 (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Lampung Barat	300.703	302.828	302.139	302.749	303.397
2	Tanggamus	592.603	598.299	640.275	645.807	652.898
3	Lampung Selatan	1.002.285	1.011.286	1.064.301	1.071.727	1.081.115
4	Lampung Timur	1.036.193	1.044.320	1.110.340	1.118.115	1.127.946
5	Lampung Tengah	1.271.566	1.281.310	1.460.045	1.477.395	1.500.022
6	Lampung Utara	614.701	616.897	633.099	634.117	635.129
7	Way Kanan	446.113	450.109	473.575	476.871	481.036
8	Tulang Bawang	445.797	450.902	430.021	430.630	431.208
9	Pesawaran	440.192	444.380	477.468	481.708	487.153
10	Pringsewu	397.219	400.187	405.466	406.823	408.415
11	Mesuji	199.168	200.198	227.518	229.772	232.685
12	Tulang Bawang Barat	271.206	273.215	286.162	287.707	289.620
13	Pesisir Barat	153.743	154.895	162.697	163.641	164.816
14	Bandar Lampung	1.033.803	1.051.500	1.166.066	1.184.949	1.209.937
15	Metro	165.193	167.411	168.676	169.781	171.169

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2023*

Dari data diatas dapat dilihat bahwasannya jumlah penduduk tertinggi berada pada Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai 1.500.022 jiwa pada tahun 2022. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada pada Kabupaten Pesisir Barat dengan nilai 153.743 jiwa pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 terdapat penurunan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Barat dengan nilai 302.139 jiwa dan pada Kabupaten Tulang Bawang dengan nilai 403.021 jiwa.

Data diatas merupakan angka presentase Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022. Dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022 dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Landasan Teori

I. Kemiskinan

Menurut Bachtiar Chamsyah suatu kondisi hidup yang merujuk pada keadaan kekurangan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup disebut miskin (Chamsyah, 2006). Seseorang dapat dikatakan miskin apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bisa dikatakan miskin. Menurut Yocoup salah satu permasalahan mendasar di suatu negara adalah kemiskinan. Kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan. Kemiskinan juga merupakan masalah global yang dihadapi oleh setiap negara. Kemiskinan juga menghambat kesejahteraan oleh sebab itu masalah kemiskinan wajib di tanggulangi (Yacoub, 2013). Menurut Purnama kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang merujuk pada situasi kurang atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup pokoknya dan tidak dapat menikmati kehidupannya dalam hal kesehatan, ibadah menurut agamanya, pendidikan, pekerjaan, pendapatan yang tinggi dan standar hidup yang layak (Purnama, 2017).

a. Teori Kemiskinan

Kemiskinan termasuk salah satu masalah yang menjadi pusat perhatian setiap orang. Menurut Nurkse kemiskinan berasal dari teori lingkaran setan kemiskinan atau bisa di sebut dengan *Vicious Circle of Poverty*. yang dimana menurut Nurkse penyebab kemiskianan adalah adanya keterbelakangan dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas (berdampak pada tingginya pengangguran). Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan (tercermin oleh rendahnya upah) yang akan berimplikasi pada rendahnya investasi dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (Niswati, 2014). Teori tersebut yang mengemukakan tentang lingkaran setan kemiskinan, Nurkse menyatakan bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan dimasa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan, “A poor country is because it is poor” (negara miskin itu miskin karena dia miskin) (Niswati, 2014).

Hal tersebut, dimana negara memiliki produktivitas yang rendah, maka rendahnya produktivitas akan menghasilkan penghasilan masyarakat yang rendah pula, sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung, padahal tabungan merupakan sumber utama pembentukan modal masyarakat. Rendahnya tabungan maka investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, dan berputar.

b. Indikator Ukuran Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik Pengukuran kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi seperti (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan,

buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan kebutuhan dasar non makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan (*Badan Pusat Statistik*, n.d.).

Untuk penetapan nominal perhitungan garis kemiskinan di setiap daerah berbeda-beda. Di Provinsi Lampung seseorang dikatakan miskin apabila pengeluaran kurang dari Rp 514.309 perbulan. Penetapan nominal tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan (*Badan Pusat Statistik*, n.d.).

c. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut (Solihin, 2014) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan yaitu :

1. Keterbatasan pendapatan, keterbatasan modal yang mencakup (modal sumberdaya manusia, modal produksi, modal sosial, sarana fisik serta hidup di lingkungan terpencil);
2. Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi guncangan-guncangan karena krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, bencana alam, serta musibah;
3. Tidak adanya suara yang mewakili dan terpuruk dalam ketidakberdayaan di dalam institusi negara dan masyarakat karena tidak ada kepastian hukum, tidak ada perlindungan kejahatan, kesewenang-wenangan aparat, ancaman dan intimidasi serta kebijakan publik yang tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.

d. Jenis-jenis Kemiskinan

Menurut Munawar (Noor, 2014) ada beberapa jenis kemiskinan yaitu :

1. Kemiskinan absolute, merupakan suatu keadaan dimana pendapatan kasar bulanan tidak mencukupi untuk membeli keperluan minimum;
2. Kemiskinan relative merupakan kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara kebutuhan dengan tingkat pendapatan lainnya;
3. Kemiskinan struktural merupakan suatu kondisi dimana ada sekelompok orang yang terdapat didalam wilayah kemiskinan, kemudian tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari zona kemiskinan;
4. Kemiskinan kultural merupakan budaya yang membuat orang miskin, yang di dalam antropologi kemiskinan sebagai adanya budaya miskin.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Saat itu IPM dibentuk dari empat indikator yaitu angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, gabungan angka partisipasi kasar, dan Produk Domestik Bruto. Kemudian Indonesia pertama kali menghitung IPM pada tahun 1996, dilakukan secara berkala pertiga tahun sekali. Namun mulai tahun 2004 IPM dihitung setiap tahun menggunakan empat indikator yaitu angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita (I. P. Sari et al., 2019). Menurut *United Nation Developmen Program* (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi untuk mengukur capaian pembangunan manusia dengan berbasis beberapa komponen dasar kualitas hidup. Adapun komponen yang di maksud adalah angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan standar hidup layak (Statistik, 2020).

Salah satu indikator kemajuan suatu negara yaitu pembangunan manusia. Suatu negara dapat dikatakan maju dengan memenuhi beberapa aspek seperti aspek kesehatan dan pendidikan warga negaranya. Paradigma pembangunan terus mengalami perubahan revolusi, hingga saat ini paradigma pembangunan menjadikan manusia sebagai tujuan pembangunan. Kesadaran bahwa sumberdaya

manusia merupakan modal dasar dari kekayaan bangsa, sementara modal fisik dan sumberdaya alam hanyalah faktor produksi yang bersifat pasif. Pada hakekatnya manusialah yang akan berperan aktif dalam aktivitas kegiatan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumberdaya alam dan melaksanakan pembangunan nasional (Mongan, 2019).

a. Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam teori Human capital yang menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Sehingga dapat dikatakan dalam teori tersebut bahwa seseorang jika melakukan peningkatan dalam pendidikan maka ia akan mendapatkan peningkatan penghasilan juga atau tidak mengalami pengangguran yang tinggi (Nurkholis, 2018). Hal tersebut yang cukup menarik dimana masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi mempunyai tingkat pengangguran yang cukup tinggi, berbeda halnya dengan masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah justru memiliki tingkat pengangguran yang rendah juga.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia yang mencakup kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) dan kondisi non fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat terlihat pada angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dapat dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat (Cassandra, 2016). Maka penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dari kualitas fisik dan kesehatan, intelektual (pengetahuan), maupun sikap dan perilaku (Devi et al., 2022)

b. Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (Faqihudin, 2010), indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat untuk mengukur capaian hasil pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia di perkenalkan pertama kali oleh *United Development Program* (UNDP) pada tahun 1990, kemudian di publikasikan secara berkala oleh *Human Development Report* (HRD). Terdapat tiga komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu :

1. Kesehatan (Harapan Hidup), merupakan rata-rata lamanya hidup penduduk yang di capai. BPS menggunakan angka harapan hidup pada waktu lahir. Menurut standar UNDP, setidaknya 20 tahun adalah harapan hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam standar ukuran minimum. Sedangkan nilai maksimumnya ditetapkan 85 tahun sebagai tujuan aspirasi mengacu pada harapan untuk keberhasilan di masa yang akan datang dari pembangunan manusia;
2. Tingkat Pendidikan dalam hal ini diukur berdasarkan pada dua indikator yaitu indikator rata-rata lama sekolah dan indikator harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah memberikan gambaran jumlah tahun yang akan digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam hal ini penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal dengan asumsi bahwa umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Batas maksimum rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimumnya sebesar 0 tahun. Sedangkan harapan lama sekolah diartikan sebagai lamanya sekolah dalam hitungan tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Batas maksimum harapan lama sekolah memiliki batas maksimum 18 tahun dan batas minimumnya sebesar 0 tahun. Sebagai output dari angka harapan lama sekolah akan memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai keadaan pembangunan pendidikan di wilayahnya. Hal ini dikarenakan harapan lama sekolah merupakan gambaran kesempatan pendidikan seseorang yang dimulai pada usia 7 tahun;

3. Standar Hidup Layak merupakan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia. Berbagai indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini. Dengan melihat ketersediaan data secara internasional UNDP memilih pengeluaran per kapita riil yang telah di sesuaikan sebagai indikator untuk standar hidup layak Pengeluaran perkapita di pengaruhi oleh kebutuhan masyarakat, harga barang dan jasa yang akan di bayarkan oleh masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: Indeks kesehatan (Harapan Hidup), Indeks Pendidikan, Indeks Standar Hidup Layak. IPM dikatakan kategori rendah apabila nilainya kurang dari 60 persen (<60) kemudian IPM dikatakan kategori sedang apabila nilainya lebih dari 60 persen dan kurang dari 70 persen (>60 - <70) selanjutnya untuk kategori tinggi dimana nilai IPM lebih dari 70 persen (>70) (Arida et al., 2015). Rumus umum yang dipakai adalah

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

c. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan

Komposisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di landaskan pada tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (daya beli) atau pendapatan. Peningkatan pendidikan seseorang sering di kaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Dalam hal ini apabila upah mencerminkan produktivitas, maka akan semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, maupun pengalaman pelatihan, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Dengan tumbuhnya ekonomi nasional akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan di suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu parameter pembangunan di suatu daerah yang berkorelasi dengan kemiskinan, semakin tinggi angka Indeks Pembangunan Manusia menandakan bahwa kualitas hidup manusia juga semakin baik (Alhudhori, 2017).

3. Jumlah Penduduk

Menurut Dr. Kartomo semua orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu, terlepas dari warga negara ataupun bukan warga negara disebut penduduk. Menurut Said Penduduk adalah jumlah orang yang mendiami suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi (Didu & Fauzi, 2016). Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwasanya usia produktif (usia yang bisa menghasilkan barang dan jasa) seorang yaitu pada umur 15-64 tahun. Menurut P.N.H Simanjuntak, Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (Putri & Nurwati, 2021). Menurut Korten dalam Kuncoro strategi dalam pembangunan adalah apa yang dimaksud dengan *People-Centered Development* atau *Putting People First*. Artinya adalah tujuan utama dari sebuah pembangunan, keinginan serta kapasitas manusia adalah sumberdaya yang paling penting. Pertambahan penduduk dapat meningkatkan luas pasar dan barang-barang yang dihasilkan dalam aktifitas ekonomi tergantung pada pendapatan penduduk dan jumlah penduduk (Kuncoro, 2010).

a. Teori Kependudukan

Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam "Essay on Population", Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan

hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menjelaskan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan kesediaan pangan mengikuti deret hitung, pada kasus ini dimana terdapat permasalahan peningkatan jumlah penduduk di Kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang. Hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan (Conway, 2015).

Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan penambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun, karena beban manusia yang makin banyak. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian (Conway, 2015).

b. Indikator Jumlah Penduduk

Menurut (Suhandi et al., 2018) perhitungan jumlah penduduk dilakukan dengan sensus penduduk. Jumlah penduduk dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

1. Kelahiran adalah proses pertumbuhan penduduk yang dilihat dari jumlah anak. Yaitu jumlah kelahiran tiap 1000 orang pertahun;
2. Kematian adalah jumlah berkurangnya penduduk yang dilihat dari pertahun perseribu penduduk. Kematian merupakan penentuan naik turunnya penduduk;
3. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bertujuan menetap di suatu tempat atau wilayah ke tempat lain. Dengan adanya perpindahan penduduk, penduduk yang datang dapat membuat jumlah penduduk bertambah.

c. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Kemiskinan

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah merupakan suatu permasalahan yang mendasar, pertumbuhan penduduk yang tidak dapat dikendalikan dapat berakibat terhadap tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu pada kesejahteraan rakyat selain itu dapat menekan angka kemiskinan (Didu & Fauzi, 2016). Menurut Nelson dan Leibstein dalam Sadoro Sukirno ada pengaruh langsung antara penambahan penduduk dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk suatu negara berkembang dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun dan dalam jangka panjang akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin (Sukirno, 2000). Peningkatan jumlah penduduk dalam waktu lama untuk negara berkembang dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin di negara tersebut.

4. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah suatu kenikmatan, akan tetapi merupakan suatu bentuk ujian hidup (Setiawan & Hasanah, 2016). Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 268 (Kemenag, 2023) yang berbunyi :

الشَّيْطٰنُ يُعِدُّكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ ؕ وَاللّٰهُ يَْعِدُّكُم مَّغْفَرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya : Setan menjajikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan manyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjajikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah maha luas lagi maha mengetahui. {Q.S Al-Baqarah : 268}

Dalam tafsir Quraish shihab menjelaskan bahwasannya setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, memalingkan dari amal saleh sehingga kalian tidak berinfak di jalan kebikan dan menyuruh kalian berbuat ke jahatan ampunan. Allah amatlah luas, dia maha kuasa untuk membuat kalian kaya. Tidak ada satu masalah pun yang tidak diketahui-Nya (Quraish Shihab, 2023). Dalam Fiqih, dibedakan antara istilah Fakir dan Miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak berkecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal (Mujahidin, 2008). Allah Swt sesungguhnya telah menciptakan manusia, sekaligus menyediakan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya (Setiawan & Hasanah, 2016). Dalam islam salah satu langkah untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan zakat. Zakat merupakan kewajiban sebagai seorang muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga oleh karena itu, setiap muslim yang mampu diwajibkan untuk membayar zakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam Syariah Islam (Rinaldi & Devi, 2022). Salah satu Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 19 (RI, 2023b) yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. {Q.S Az-Zariyat : 19}

Ayat ini menjelaskan bahwa disamping mereka melaksanakan salat wajib dan sunah, mereka juga selalu mengeluarkan infaq fi sabilillah dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan derma atau sokongan sukarela karena mereka memandang bahwa pada harta-harta mereka itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu untuk meminta. Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Saw pernah menerangkan siapa saja yang tergolong orang miskin, dengan sabdanya.: Bukanlah orang miskin itu yang tidak diberi sebiji dan dua biji kurma atau sesuap dan dua suap makanan. Beliau ditanya, “(jika demikian) siapakah yang dinamakan miskin itu?” Beliau menjawab, “orang yang tidak mempunyai apa yang diperlukan dan tidak di kenal tempatnya sehingga tidak diberikan sedekah kepadanya. Itulah orang yang mahrum tidak dapat bagian (RI, 2023a).

Di samping pemberian wajib yang dikeluarkan umat Islam berupa zakat. Islam juga berusaha membina pribadi-pribadi yang luhur, dermawan dan murah hati. karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup sendiri. Karena itulah, di dalam beberapa ayat al-Qur'an Allah SWT menganjurkan agar umat Islam mau menginfakkan dan membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah untuk kepentingan dan kemaslahatan umat (Hakim & Syaputra, 2020). Dalam Islam juga dijelaskan anjuran untuk infak dan bersedekah Salah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 10 (Q.S Al-Munafiqun : 10), (2023) yang berbunyi :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh {Q.S Al-Munafiqun : 10}

Ayat ini menghimbau orang-orang beriman untuk memfungsikan harta dengan benar. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu untuk kepentingan duafa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu sehingga

kamu tak sempat berinfak; lalu dia berkata setelah kematian terjadi, menyesalinya, “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dengan hartaku ini dan aku dengan demikian akan termasuk orang-orang yang saleh, karena menjadi dermawan (*Tafsir Q.S Al-Munafiqun : 10*, 2023).

Menurut (Wuri, 2013) ada beberapa prinsip – prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan yaitu :

- a. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor growth). Islam mencapai pro-poor growth melalui dua cara yaitu pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil;
- b. Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan masyarakat banyak (pro-poor budgeting). Dalam sejarah Islam terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai pro-poor budgeting, yaitu kebijakan fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik atau efisiensi anggaran;
- c. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor infrastructure) sehingga memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian;
- d. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (pro-poor public services). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang harus mendapat perhatian serius yaitu: birokrasi, pendidikan dan kesehatan;
- e. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak masyarakat miskin (pro-poor income distribution).

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh berupa angka. Kemudian akan dilakukan analisis data menggunakan alat analisis ekonomi. Menurut Sugiono dalam sandu siyoto dan ali sodik metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, kemudian digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan (Siyoto & Sodik, 2015). Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang di laksanakan dengan menggunakan metode pengumpulan informasi dan data yang bersumber dari buku, penelitian terdahulu, artikel, catatan serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin di teliti (M. Sari & Asmendri, 2020).

Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah laporan tahunan di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Data yang diambil adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah penduduk dan Kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Sampel dalam penelitian ini adalah data Jumlah Penduduk, dan data Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022. Sampel yang di ambil adalah data 15 Kabupaten/Kota di kali 5 tahun menjadi 75 sampel.

D. Pembahasan

a. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022

Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsis Lampung tahun 2018-2022. Hasil regresi menunjukkan variabel indeks pembangunan manusia memperoleh nilai *coefficien* sebesar -23,91860 dan nilai *prob.* 0,0003 (<0,05) maka dapat dinyatakan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai kemiskinan (jumlah penduduk miskin)

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya apabila terjadi kenaikan pada Indeks Pembangunan Manusia maka akan terjadi Penurunan pada jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di provinsi Lampung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridho Andykha, Herniwati Retno Handayani dan Woyanti dengan judul “*Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*” yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara negative terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Teori Human Capital menyatakan bahwasanya Pendidikan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan produktifitas tenaga kerja. Dengan adanya hal ini dapat di simpulkan bahwa jika seseorang melakukan peningkatan dalam pendidikannya maka ia akan mendapatkan peningkatan penghasilan pada akhirnya akan menciptakan taraf hidup yang layak dan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya kebutuhan hidup terpenuhi akan dapat mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dimana indeks pembanguan manusia memiliki hubungan yang terbalik terhadap kemiskinan (jumlah penduduk miskin). Apabila terjadi kenaikan pada indeks pembangunan manusia maka akan di ikuti dengan penurunannya kemiskinan (jumlah penduduk miskin)

Indeks pembangunan manusia terdiri dari tiga indikator yaitu kesehatan kemudian bidang pendidikan dan juga standar hidup layak. Dimana untuk indikator kesehatan yang di ukur melalui angka harapan hidup. Angka harapan hidup di provinsi lampung dari tahun 2018-2022 dengan melihat data sebesar 70 tahun. Hal ini menunjukkan tingkat kesehatan di Provinsi cukup baik. Selanjutnya untuk indikator pendidikan dilihat dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dimana untuk angka harapam sekolah dari tahun 2018-2022 sebesar 12 tahun yang berarti bahwa penduduk di Provinsi Lampung mempunyai harapan lama sekolah selama 12 tahun atau sampai lulus SMA (6 tahun SD, 3 SMP, dan 3 tahun SMA). Selanjutnya untuk angka rata-rata sekolah sebesar 7-8 tahun yang berarti penduduk Provnsi Lampung yang berumur 25 keatas rata-rata lama sekolahnya adalah 7-8 tahun atau kelas 7-8 SMP. Selanjutnya untuk indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan dimana pada tahun 2018 sebesar Rp 9.858.000 per orang pertahun lalu pada tahun 2022 menjadi Rp 10.336.000 per orang pertahun.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan perlu adanya peningkatan pada indikator pendidikan sehingga angka harapan sekolah tidak hanya sampai di sekolah menengah atas namun bisa kejenjang yang lebih tinggi lagi. Presentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tergolong kedalam kategori tinggi dengan angka diatas 70 persen haya terdapat di kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Diluar dari kedua kota itu masih dibawah angka 70 persen. Fenomena ini menjelaskan bahwasanya pendidikan di daerah kabupaten masih rendah dibandingkan daerah perkotaan.

Teori Llingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh nurkse menjelaskan kemiskinanian dapat di sebabkan oleh ketertinggal sumberdaya manusia yang dilihat melalu Indeks Pembangunan Manusia. Perlu adanya kebijakan yang harus dilakukan pemerintah kususnya daerah Kabupaten untuk meningkatkan sumberdayamanusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama pada indikator tingkat pendidikan. Adapun langkah yang bisa dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat maupun anak-anak tentang pentingnya pendidikan, pentingnya sekolah, pentingnya mencari ilmu agar tercipta sumberdaya manusia yang unggul yang berkopenten. Dengan adanya sumberdaya yang unggul dapat memperluas peluang pekerjaan. Selain itu perlu adanya sosialisasi terhadap birokrasi pendidikan tentang program beasiswa dimana penduduk yang kekurangan juga bisa melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi tanpa harus takut dengan biaya yang dikeluarkan.

b. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.

Hasil Penelitian yang di lakukan terkait dengan pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022. Hasil regresi menunjukkan variabel jumlah penduduk memiliki nilai *coefficien* sebesar sebesar $-0,018591$ dan nilai *prob.* sebesar $0,0499$ ($<0,05$) maka dapat dinyatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (jumlah penduduk miskin) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Dalam hal ini dapat dijelaskan apabila terjadi peningkatan Jumlah Penduduk maka akan diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Penelitian yang dilakukan Sahrudin Didu dan Ferri Fauzi dengan judul “*Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak*” yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negative terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan total jumlah penduduk sebesar 9.176.546 jiwa kemudian untuk Kabupaten/Kota jumlah penduduk tertinggi berada pada kabupaten Lampug Tengah dengan nilai 1.500.022 jiwa pada tahun 2022. Menurut badan pusat statistik penduduk dengan usia produktif yaitu dengan retan umur 15-64 tahun di Provinsi Lampung pada tahun 2018 jumlah penduduk usia produktif sebesar 5.619.809 jiwa dari total jumlah penduduk sebesar 8.370.485 jiwa atau 68 persen jumlah penduduk di Provinsi Lampung berada di usia produktif. Kemudian pada tahun 2022 jumlah penduduk usia produktif di Provinsi Lampung sebesar 6.279.7100 dari total jumlah penduduk sebesar 9.176.546 jiwa atau 68 persen total jumlah penduduk di Provinsi Lampung berada pada usia produktif.

Tingginya angka penduduk pada usia produktif dapat menekan angka kemiskinan. Dimana usia produktif dapat memberi kesempatan kerja yang lebih banyak. Korten menjelaskan bahwasanya pertambahan penduduk dapat meningkat luas pasar dan barang-barang yang dihasilkan dari aktifitas ekonomi tergantung pada pendapatan penduduk dan jumlah penduduk. Perlu adanya peningkatan pendapatan di Provinsi Lampung. Sehingga aktivitas ekonomi dapat terus berjalan dan berkembang. Nurse menyatakan dalam teori kemiskinan bahwasanya ketidaksempurnanya pasar dan kurangnya modal dapat menyebabkan rendahnya produktifitas sehingga berdampak terhadap tingginya pengurangan. Dari penjelasan tersebut dapat di pahami bahwasanya penduduk Provinsi Lampung terutama pada usia produktif masih kekurangannya modal dalam aktifitas ekonomi selain itu juga perlu adanya peningkatan pendapatan. Pemerintah dalam hal ini dapat memberi kebijakan mengenai peningkatan upah minimum, dan perluasan kembali lampangan pekerjaan. Sehingga aktifitas ekonomi terus berkembang dan jumlah penduduk yang bekerja terus bertambah sehingga dapat berdampak terhadap penurunan kemiskinan.

c. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk secara simultan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Hasil penelitian terkait dengan pengaruh indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022. Hasil regresi menunjukkan nilai F-statistic sebesar $1674,210$ dengan nilai *prob.* $0,00000$. $F_{tabel} = 3,124$ maka dapat di simpulkan variabel independen indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen kemiskinan (jumlah penduduk miskin) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022. $F_{hitung} > F_{tabel}$. Kemudian pada uji koefisien determinasi diperoleh hasil regresi dengan nilai *adjusted R-square* sebesar $0,997243$ atau 99 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu variabel indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk memiliki hubungan dengan variabel dependen kemiskinan (jumlah penduduk miskin) dengan kontribusi sebesar 99 persen. Sisanya 1 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian.

d. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah suatu kenimatan akan tetapi merupakan ujian hidup. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi :

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya : setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah maha luas lagi maha mengetahui. (Q.S Al-Baqarah : 268).

Dalam tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, melaingkan dari amal saleh sehingga kalian tidak berinfak di jalan kebaikan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan. Ampunan Allah amatlah luas, Dia maha kuasa untuk membuat kalian kaya. Tidak ada satu masalahpun yang tidak diketahui-Nya. Dalam Islam salah satu langkah untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan zakat. Zakat merupakan kewajiban sebagai seorang muslim yang mampu untuk membayarnya dan di peruntukan untuk mereka yang berhak menerimanya. Salah satu Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. (Q.S Az-Zariyat : 10).

Ayat ini menjelaskan bahwa disamping mereka melaksanakan shalat wajib dan sunah, mereka juga selalu mengeluarkan infaq fi sabilillah dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan derma atau sokongan sukarela karena pada harta mereka itu ada hak orang fakir miskin yang memintaminta dan fakir miskin yang tidak memintaminta bagaiannya karena mereka mersa malu. Selain pemberian wajib yang dikeluarkan umat Islam berupa zakat. Islam juga menganjurkan umatnya untuk menginfakkan dan membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah Swt untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Firman Alla Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu; lalu dia berkata (menyesal), "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh (Q.S Al-Munafiqun : 10).

Ayat tersebut mengajak orang-orang beriman untuk memfungsikan harta dengan benar. Dan infaklah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu untuk kepentingan duafa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu sehingga kamu tak sempat berinfak; lalu dia berkata setelah kematian terjadi, menyesalinya, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematian sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dengan hartaku ini dan aku dengan demikian akan termasuk orang-orang yang saleh, karena menjadi darmawan. Selain itu ada beberapa langkah kebijakan publik dapat dilakukan pemerintah sesuai dengan syariat islam untuk mengentaskan kemiskinan seperti.

1. Tidak mengikutsertakan unsur riba dalam aktivitas ekonomi,
2. Memperhatikan penyediaan layanan publik seperti sektor kesehatan (memperhatikan msyarakat dengan melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat),

3. Memperhatikan penyediaan layanan public seperti sektor pendidikan (diharapkan ada langkah nyata seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat miskin mengenai pentingnya pendidikan dan memotivasi serta memberi arahan),
4. Pembangunan infrastruktur yang baik (tidak hanya berfokus di wilayah perkotaan melainkan juga daerah terpencil seperti pedesaan sehingga akses dalam melakukan aktivitas ekonomi lebih cepat),
5. pemerataan distribusi pendapatan yang lebih fokus pada masyarakat miskin,
6. serta peningkatan sumberdaya manusia terutama pada masyarakat yang kurang mampu dengan melakukan pelatihan dan lain sebagainya.

E. Hasil

Berdasarkan hasil Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022. Dalam hal ini apabila terjadi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia akan diikuti dengan penurunannya Kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin).
2. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Dalam hal ini dapat jelaskan apabila terjadi kenaikan jumlah penduduk maka akan di ikuti dengan penurunannya jumlah penduduk miskin.
3. Pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung secara simultan menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
4. Dalam Islam pengentasan kemiskinann dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mengeluarkan zakat dan juga berinfak. Islam menganjurkan umatnya untuk berzakat dengan sebagian hartanya karena dalam islam harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita. Melainkan ada sebagian harta milik orang lain. Berinfak juga merupakan salah satu langkah untuk mengurangikemiskian. Dimana dengan berinfak orang miskin dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian Terciptanya anggaran-anggaran negara terutama pada kebijakan publik diharapkan mampu untuk mengurangi Kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, K. A. (2021). Peran Pendidikan Kewirausahaan Untuk Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*, 2(06), 173–181.
- Alhudhori, M. (2017). Pengaruh IPM, PDRB dan jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 1(1), 113–124.
- Arida, A., Zakiah, Z., & Julaini, J. (2015). Analisis permintaan dan penawaran tenaga kerja pada sektor pertanian di Provinsi Aceh. *Jurnal Agrisepe*, 16(1), 66–78.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.).
- Cassandra. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan DI Indonesia*. (Skripsi dipublikasikan Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor).
- Chamsyah, B. (2006). *Tenologi Penanggulangan Kemiskinan* (Edisi Pert). RMBooks.
- Conway, E. (2015). *50 Gagasan Ekonomi Yang Perlu Anda ketahui*. Esensi Erlangga Group.
- Devi, Y. D., Nurhayati, N., Saefurrohman, G. U. S., & Rakhmat, R. (2022). Analisis Pengaruh Penggunaan Media Sosial Yang Efektif Dan Kualitas SDM Terhadap Tumbuh Kembang Umkm Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 17–40.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1).
- Faqihudin, M. (2010). Human Development Index (HDI) Salah Satu Indikator Yang Populer Untuk Mengukur Kinerja Pembangunan Manusia. *Cermin*, 047.
- Hakim, L., & Syaputra, A. D. (2020). Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 629–644.
- Itang, I. (2013). Penyebab Kemiskinan Dan Cara Menanggulangnya. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
- Kemenag, Q. (2023). *Q.S Al-Baqarah : 268*. Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar Ekonometrika Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176.
- Mujahidin, A. (2008). Pengentasan Kemiskinan Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 7(1), 168–184.
- Niswati, K. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di daerah istimewa yogyakarta tahun 2003-2011. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 9(1).
- Noor, M. (2014). Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia (Studi Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kota Semarang). *Serat Acitya*, 3(1), 130.
- Nurkholis, A. (2018). *Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People*

Centered Development Theory.

- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240.
- Purnama, N. I. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan*, 17(1), 163054.
- Putri, N. C., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak pada Tingginya Angka Kemiskinan yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 3(1), 1–15.
- Q.S Al-Munafiqun : 10*. (2023). Qur'an Kemenag.
- Quraish Shihab, M. (2023). *Surat Al-Baqarah Ayat 268*. Quran Hadits. <https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-268/#tafsir-quraish-shihab>
- RI, K. A. (2023a). *QURAN HADITS (Al-Qur'an Surat Az-Zariyat Ayat 19)*. Qura.Kemenag.Go.Id. <https://quranhadits.com/quran/51-az-zariyat/az-zariyat-ayat-19/#tafsir-quraish-shihab>
- RI, K. A. (2023b). *QURAN HADITS (Al-Qur'an Surat Az-Zariyat Ayat 19)*. Quran.Kemenag.Go.Id. <https://quranhadits.com/quran/51-az-zariyat/az-zariyat-ayat-19/#tafsir-quraish-shihab>
- Rinaldi, A., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 87–110.
- Ristika, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 129–136.
- Sari, I. P., Riyono, B., & Supandi, A. (2019). Indeks pembangunan manusia di Madura: Analisis tipologi Klassen. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 6(2), 82–95.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
- Setiawan, F., & Hasanah, I. (2016). Kemiskinan dan Pengentasannya dalam pandangan Islam. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2).
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Solihin, D. (2014). *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. Yayasan Empat Sembilan Indonesia.
- Statistik, B. P. (2020). Indeks pembangunan manusia. *Retrieved Februari, 18*.
- Suhandi, N., Putri, E. A. K., & Agnisa, S. (2018). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linear di Kota Palembang. *Jurnal Informatika Global*, 9(2).
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi Modern: perkembangan pemikiran dari klasik hingga keynesian baru*.
- Tafsir Q.S Al-Munafiqun : 10*. (2023). Qur'an Kemanag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/63?from=1&to=11>



- Wuri, R. (2013). Kemiskinan: Bagaimana Islam Memandangnya. *Jurnal The Moslem Planners, 1*.
- Yacoub, Y. (2013). *Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*.
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia, 11(2)*, 27–31.